

BAB. I

PENDAHULUAN

Tercapainya pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai penyedia lahan pertanian dan tanaman pangan sebagai komoditas yang diunggulkan dalam pencapaian ketahanan pangan, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Pertanian merupakan salah satu sektor sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Keragaman karakteristik sumber daya lahan merupakan potensi bagi Indonesia untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian unggulan sesuai dengan kondisi agroekosistem. Berdasarkan luas lahan dan keragaman agroekosistem, peluang pengembangannya sangat besar dan beragam. Namun, sampai saat ini sektor pertanian belum handal dalam mensejahterakan petani, memenuhi kebutuhan sendiri, menghasilkan devisa, dan menarik investasi (Atman: 2009).

Hasil produksi tanaman pangan, perkembangan luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut Subround 2009-2011 (Badan Pusat Statistik, 2012) menunjukkan, produksi padi tahun 2011 (angka sementara) sebesar 65,74 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan sebesar 0,73 juta ton (1,10 persen) dibandingkan tahun 2010. Penurunan produksi padi tahun 2011 tersebut terjadi di Jawa sebesar 1,97 juta ton, sedangkan di luar Jawa mengalami peningkatan sebesar 1,24 juta ton. Penurunan produksi terjadi karena penurunan luas panen seluas 52,13 ribu hektar (0,39 persen) dan produktivitas sebesar 0,35 kuintal/hektar (0,70 persen). Produksi jagung tahun 2011 sebesar 17,63 juta ton, turun 3,81 persen; Produksi kedelai tahun 2011 sebesar 843,84 ribu ton, turun 6,97 persen.

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	Satuan	2009	2010	2011
1. Padi				
Luas Panen	Ha	12 883 576	13 253 450	13 201 316
Produktivitas	ku/ha	49,99	50,15	49,80
Produksi (ton)	Ton	64 398 890	66 469 394	65 740 946
2. Jagung				
Luas Panen	Ha	4 160 659	4 131 676	3 861 433
Produktivitas	ku/ha	42,37	44,36	45,65
Produksi (pipilan kering)	Ton	17 629 748	18 327 636	17 629 033
3. Kedelai				
Luas Panen	Ha	722 791	660 823	620 928
Produktivitas	ku/ha	13,48	13,73	13,59
Produksi (biji kering)	Ton	974 512	907 031	843 838
4. Kacang Tanah				
Luas Panen	Ha	622 616	620 563	539 230
Produktivitas	ku/ha	12,49	12,56	12,81
Produksi (biji kering)	Ton	777 888	779 228	690 949
5. Kacang Hijau				
Luas Panen	Ha	288 206	258 157	297 126
Produktivitas	ku/ha	10,91	11,30	11,48
Produksi (biji kering)	Ton	314 486	291 705	341 097
6. Ubi Kayu				
Luas Panen	Ha	1 175 666	1 183 047	1 182 637
Produktivitas	ku/ha	187,46	202,17	203,02
Produksi (umbi basah)	Ton	22 039 145	23 918 118	24 009 624
7. Ubi Jalar				
Luas Panen	Ha	183 874	181 073	177 857
Produktivitas	ku/ha	111,92	113,27	123,26
Produksi (umbi basah)	Ton	2 057 913	2 051 046	2 192 242

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012.

Penelitian ini akan mengkaji pemanfaatan tanaman pangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat (desa). Pengkajian tersebut akan menghasilkan penilaian baru (evaluasi) terhadap bentuk atau model pemanfaatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dimana pada akhirnya dapat mendorong pencapaian ketahanan pangan di daerah (Ariani, 2007; Purwaningsih, 2008; Wehrheim, 2006). Daerah yang dimaksud merupakan daerah pedesaan yang banyak tersedia tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian mereka. Namun, di sisi lain, banyak tenaga kerja pedesaan yang lebih suka „boro“ ke daerah lain (Purnomo, 2009), bahkan ke luar negeri untuk bekerja dengan harapan akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada „hanya sekedar“ mengolah lahan pertanian di daerah asalnya. Keputusan logis mereka memang tidak bisa dicegah. Namun, apabila kondisi ini dibiarkan maka akan terjadi semacam transfer tenaga kerja dari desa ke kota. Secara tidak langsung keadaan tersebut dapat menyebabkan turunnya produktivitas lahan pertanian, terutama tanaman pangan bagi daerah yang mempunyai potensi pertanian dengan lahan tanaman pangan. Seterusnya apabila produktivitas lahan turun, hal ini dapat memicu tidak tercapainya ketahanan pangan.

Sampai saat ini Pemda kabupaten Wonogiri belum memaksimalkan program-program (khusus) yang menawarkan strategi ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tanaman pangan, padahal wilayah kabupaten Wonogiri memiliki potensi pemenuhan aspek ketahanan pangan melalui komoditas tanaman pangan. Selain itu, pemerintah daerah setempat juga belum mempunyai program khusus untuk mengupayakan bagaimana caranya menarik perhatian para migran supaya lebih menyukai mengerjakan lahan di daerahnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daripada boro keluar daerah.

Kondisi aktual keterlibatan pemerintah kabupaten Wonogiri dalam pemanfaatan lahan tanaman pangan di daerah kantong migran, berdasarkan survey awal melalui diskusi dengan pihak terkait (*keyperson*), menunjukkan bahwa pemerintah daerah Wonogiri secara umum sudah mem-*backup* supaya terwujud ketahanan pangan melalui tanaman pangan, diantaranya dengan menaikkan “pamor ubi kayu (*cassava*) melalui promosi komoditi lokal, namun belum ada strategi khusus untuk pencapaian ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tanaman pangan. Kondisi ini salah satunya disebabkan sebagian masyarakat di Kabupaten Wonogiri menganggap tanaman pangan “kurang” memberikan hasil secara ekonomi, dan lebih suka

“*mboro*”. Sebagai gambaran, berikut merupakan contoh produksi pangan di kabupaten Wonogiri (WDA, 2011):

Tabel 2. Luas Panen Rata-Rata Produksi Dan Produksi Bahan Makanan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2010

No	Jenis Tanaman	Tahun	Luas Panen (ha)	Rata-rata (kw/ha)	Produksi (kw)
1	Padi Sawah	2010	49,876	58.19	2,902,305
		2009	47,970	59.73	2,865,267
		2008	43,600	56.09	2,445,492
		2007	45,015	53.90	2,435,101
		2006	46,351	53.60	2,484,411
2	Padi Gogo	2010	13,299	44.13	586,892
		2009	12,569	38.26	123,898
		2008	12,957	32.89	426,151
		2007	13,081	31.20	392,294
		2006	12,232	30.81	376,868
3	Jagung	2010	66,742	57.56	3,841,721
		2009	64,976	58.04	3,771,109
		2008	71,259	53.41	3,805,950
		2007	72,753	56.25	4,107,820
		2006	74,582	56.15	4,187,465
4	Ubi Kayu	2010	62,269	193.14	12,026,738
		2009	63,337	170.08	10,772,082
		2008	66,226	153.65	10,175,989
		2007	69,819	173.60	12,142,003
		2006	67,688	173.18	11,722,332
5	Kacang Tanah	2010	44,021	12.44	547,677
		2009	44,078	12.46	549,227
		2008	45,725	12.96	592,714
		2007	49,713	14.40	733,182
		2006	47,781	14.00	683,748

No	Jenis Tanaman	Tahun	Luas Panen (ha)	Rata-rata (kw/ha)	Produksi (kw)
6	Kedelai	2010	27,439	12.49	34,275
		2009	25,739	13.65	351,241
		2008	22,765	13.11	29,855
		2007	22,101	15.10	337,752
		2006	22,788	15.02	342,284
7	Kacang Hijau	2010	260	9.07	2,429
		2009	551	7.37	4,064
		2008	516	7.25	3,740
		2007	383	9.90	3,790
		2006	270	8.56	2,311
8	Sorghum	2010	889	30.89	22,384
		2009	687	57.35	6,894
		2008	1,388	11.40	15,826
		2007	1,289	12.15	16,031
		2006	1,590	11.26	17,904
9	Ketela Rambat	2010	201	183.11	36,738
		2009	173	180.57	31,239
		2008	200	135.28	27,056
		2007	251	146.90	37,273
		2006	192	145.70	27,974

Sumber data Wonogiri Dalam Angka 2011

Turunnya produktivitas lahan memang tidak hanya dipengaruhi oleh kekurangan tenaga kerja yang mengolah lahan pertanian (karena banyak tenaga kerja yang pergi meninggalkan daerah asalnya). Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan peran kelembagaan terkait dengan potensi lahan pertanian, juga termasuk penyebab turunnya atau berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Dalam konteks penelitian ini, „lemahnya“ pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan terhadap pemanfaatan lahan secara maksimal dalam rangka tercapainya ketahanan pangan, akan menjadi perhatian dan kajian pembahasan. Pemberdayaan masyarakat

yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah „kantong migran“, bukan terfokus pada pemberdayaan orang „boro“ atau migran yang sekedar bersifat *adventurer*.

Penelitian ini diajukan dalam rangka mendapatkan bantuan hibah penelitian disertasi, sehinggafokus penelitian ini berusaha menyelesaikan sebagian peneliti disertasi yang sedang dikerjakan, yaitu pemanfaatan lahan tanaman pangan dan peran kelembagaan petani. Peneliti berasumsi bahwa kurangnya pemberdayaan masyarakat dan peran kelembagaan merupakan penyebab turunnya atau berkurangnya produktivitas lahan pertanian, selain kurang maksimalnya pemanfaatan lahan yang ada di lokasi penelitian. Konteks pembahasan penelitian ini akan mengkajikurangnya pemanfaatan lahan tanaman pangan dan kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat (desa) di kantong migran.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, rumusan permasalahannya adalah bagaimana pemanfaatan lahan tanaman pangan di kantong migran? Bagaimana bentuk pemberdayaan lembaga masyarakat (desa: petani) di kantong migran? Bagaimana upaya penguatan penguatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat di kantong migran?

B. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemanfaatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat (desa) dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan umum tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan khusus yaitu:

1. Mengevaluasi pemanfaatan lahan tanaman pangan di kantong migran
2. Mengevaluasi pemberdayaan lembaga masyarakat di daerah kantong migran
3. Merumuskan model penguatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat di kantong migran

C. Urgensi Penelitian

Beberapa urgensi atau keutamaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dengan mengevaluasi pemanfaatan lahan tanaman pangan di kantong migran, akan diketahui wilayah mana dan hal apa saja yang belum maksimal dalam pemanfaatan

lahan tanaman pangan, sehingga menjadi justifikasi dalam meningkatkan dan menguatkan pemanfaatan lahan tanaman pangan.

- b. Dengan mengevaluasi pemberdayaan lembaga masyarakat (desa) di daerah kantong migran, akan menjadi justifikasi dalam meningkatkan dan menguatkan tingkat keberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada.
- c. Dengan dirumuskannya model penguatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat (desa) di daerah kantong migran, akan memudahkan dalam menentukan program kebijakan dalam rangka wujudnya ketahanan pangan daerah.
- d. Dalam jangka panjang, adanya model penguatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat (desa) di daerah kantong migran tersebut, diharapkan akan menjadi panduan dan diajukan sebagai rekomendasi kebijakan oleh instansi terkait, dalam hal ini kantor atau dewan ketahanan pangan tingkat daerah kabupaten maupun provinsi (bahkan nasional), yang berisi petunjuk praktis, saran, serta indikator penguatan lahan tanaman pangan dan pemberdayaan dimana para petani dan kelompok tani serta kelembagaan petani di masing-masing daerah dapat mengadopsi hal yang sama.